

## KETERSEDIAAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Nuhfil Hanani AR

### Ketersediaan Pangan

#### Ketersediaan Pangan Wilayah

Ketersediaan pangan merupakan salah sub sistem ketahanan yang cukup penting. Ketersediaan pangan wilayah untuk suatu komoditas tertentu didefinisikan sebagai :

$$KTSP = PROD + (IP-XP) + SP+ TRNS - SUTP - TRP- MAKNAK- INDUSP$$

Dimana :

KTSP	= ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia
PROD	= produksi pangan domestik
(IP-XP)	= net impor (IP adalah impor, XP adalah ekspor)
SP	= stok pangan yang dikeluarkan
TRNS	= transfer pangan /bantuan pangan
SUTP	= susut
TRP	= tercecer
MAKNAK	= pangan yang dikonsumsi ternak
INDUSP	= pangan yang digunakan untuk kebutuhan industri

Perhitungan ketersediaan pangan wilayah ini sangat penting dilakukan untuk melihat surplus tidaknya pangan di suatu daerah tertentu. Dengan diketahuinya ini neraca tersebut maka antisipasi untuk ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dapat dilakukan sejak dini. Sebagai ilustrasi pentingnya analisis ketersediaan pangan wilayah ini disajikan dalam kasus di Jawa Timur sebagaimana terlihat Tabel berikut. Kebutuhan pangan di Jawa Timur memang hampir dapat dipenuhi semua dari potensi domestik, kecuali untuk komoditas kedelai yang masih mengalami defisit sebesar 110.648 ton. Sedangkan untuk beras, jagung, kacang maupun ubi mengalami surplus. Surplus pangan di Jawa Timur selain didukung sumberdaya alam yang sesuai, juga potensi sumberdaya manusia dan adanya dukungan

infrastruktur ekonomi yang lebih baik. Kemandirian pangan di Jawa Timur dari sisi ketersediaan ini dapat diketahui lebih rinci dari tabel berikut ini.

Selain mempertimbangkan ketersediaan dan konsumsi komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan dan umbi-umbian, Jawa Timur juga merupakan sumber bahan pangan lainnya yang bersumber dari ternak dan ikan yaitu beberapa jenis bahan makanan lainnya seperti daging, telur, susu dan ikan.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka analisis ketersediaan wilayah secara tidak langsung juga berguna untuk melihat kemandirian pangan.

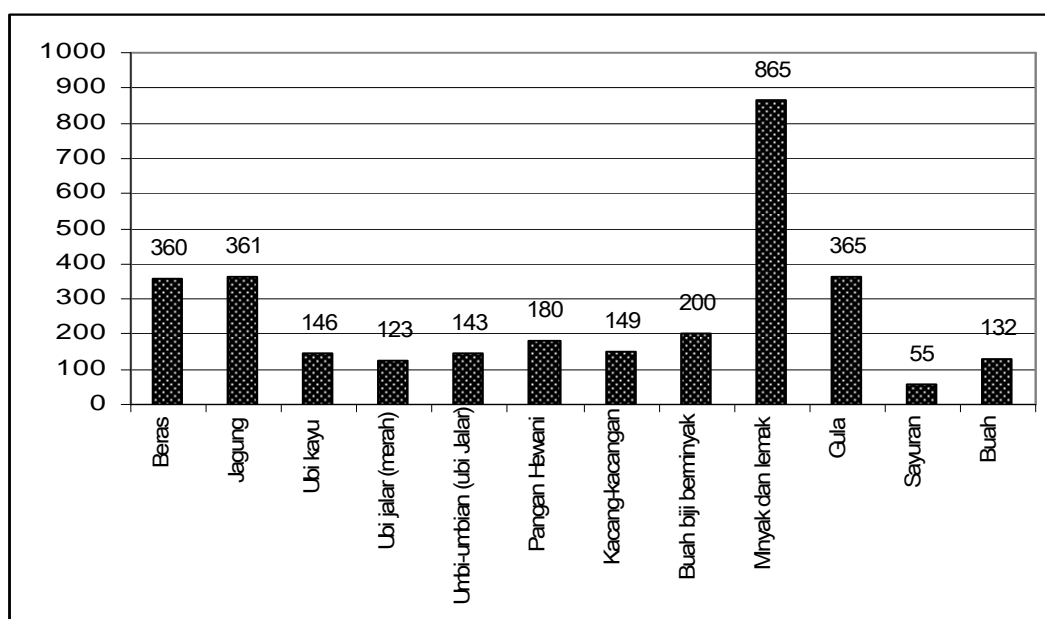
Tabel 6.1. Perkembangan Ketersediaan dan Konsumsi Bahan Pangan di Jawa Timur tahun 2004

No	Komoditas	Ketersediaan (ton)	Konsumsi (ton)	Surplus/defisit (ton)
1.	Beras	5,225,372	3,441,232	1,784,140
2.	Jagung	3,634,680	293,827	3,340,853
3.	Kedelai	291,431	402,079	-110,648
4.	Kacang Tanah	194,414	28,720	165,694
5.	Kacang Hijau	75,467	19,883	55,584
6.	Ubi Kayu	3,368,956	771,019	2,597,938
7.	Ubi Jalar	145,234	105,674	39,560
8.	Daging	199,305	117,089	82,216
9.	Telur	261,591	179,720	81,871
10.	Susu	200,350	46,025	154,325
11.	Ikan	478,574	462,096	16,478

Sumber : Badan ketahanan Pangan Jawa Timur, 2005

### Ketersediaan Pangan Per Kapita

Pengukuran ketersediaan pangan dalam konteks ketahanan pangan saat ini diukur dengan ketersediaan pangan per kapita. FAO (2005) telah mencoba mengembangkan ketersediaan pangan minimum dengan ukuran Kkal/kapita per hari (Tabel ). Dalam rangka menyusun ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk kalori diperlukan informasi kandungan kalori setiap komoditas pangan. Di Indonesia pengukuran kandungan kalori dari setiap jenis komoditas disajikan dalam Gambar sebagai berikut:



(Sumber: Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan RI, 1992; Badan Ketahanan Pangan, 2005, dikembangkan ).

Gambar6.1. Kandungan Kalori setiap 100 gram

Angka yang ditetapkan oleh FAO merupakan standar minimal untuk ketersediaan pangan dalam kalori. Di Indonesia standar ketersediaan pangan dengan mengacu pada Angka Kecukupan Gizi rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 adalah sebesar 2200 kilo kalori dan protein 57 gram per kapita per hari.

Tabel 6.2. Ketersediaan Pangan Minimum di Asia (2200 kilo kal/kapita per hari)

Negara	1969-1971	1979-1981	1990-1992	1995-1997	2001-2003	2002-2004
Indonesia	1 750	1 770	1 810	1 820	1 840	1 840
Brunei	1 840	1 870	1 890	1 900	1 910	1 910
China	1 850	1 890	1 910	1 920	1 930	1 930
India	1 770	1 780	1 790	1 800	1 820	1 820
Malaysia	1 770	1 810	1 830	1 830	1 850	1 850
Philippines	1 740	1 760	1 770	1 780	1 800	1 810
Saudi Arabia	1 810	1 820	1 850	1 860	1 860	1 860
Korea	1 830	1 870	1 920	1 920	1 930	1 930
Thailand	1 740	1 780	1 840	1 850	1 860	1 870
Viet Nam	1 730	1 750	1 770	1 800	1 840	1 840

Sumber FAO statistic, 2005

Angka ketersediaan ini selalu berubah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman khususnya menuju hidup sehat dan produktif. Ketersediaan pangan Indonesia telah melebihi standar tersebut yakni sebesar 3031 kilo kalori dan protein 76,28 gram per kapita per hari (NBM, 2005). Tabel berikut meyajikan tentang perkembangan ketersediaan pangan di Indoensia.

Tabel 6.3. Perkembangan Ketersediaan Pangan di Indonesia

Ketersediaan	2000	2001	2002	2003	2004
Energi (Kal/kapita/hari)	2966	2958	2962	3083	3031
Protein Total (gram/kap/hari)	76,72	71,36	74,85	75,52	76,28
Nabati (gram/kap/hari)	65,14	59,52	62,68	63,32	62,78
Hewani (gram/kap/hari)	11,58	11,85	12,17	12,20	13,57

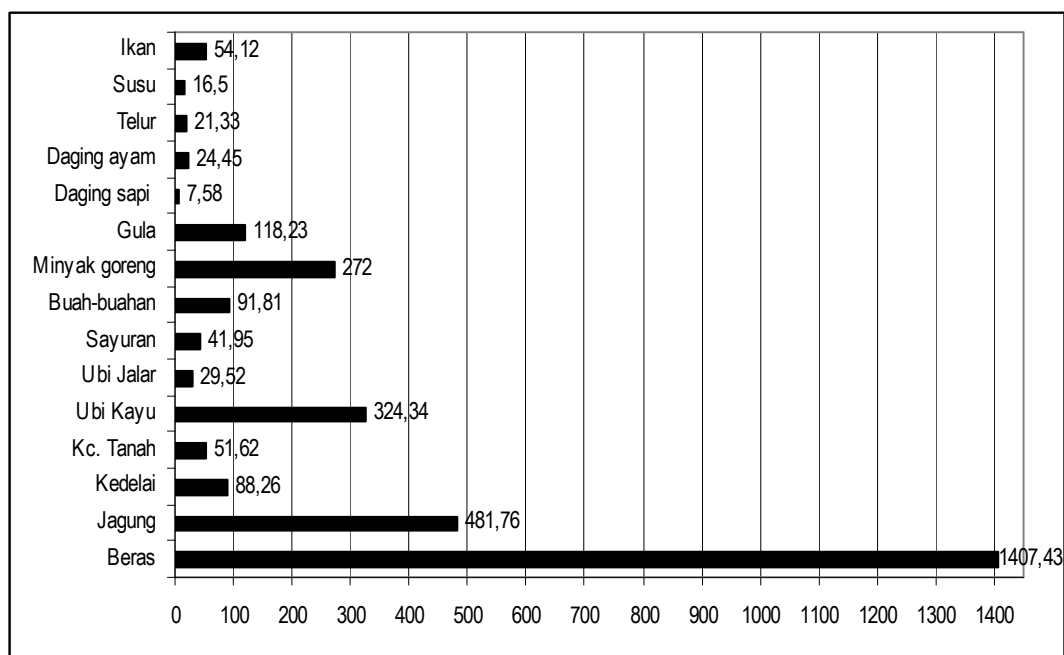
Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, 2006

Perkembangan ketersediaan pangan di Indonesia walaupun meningkat namun peningkatannya relatif kecil. Hal ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa pemerintah cenderung menyediakan pangan dalam bentuk beras.

Tabel 6.4. Ketersediaan pangan menurut Komoditasnya (Kal/kapita/hari), 2004

Komoditas	Ketersediaan domestik (000 ton)	Penyediaan domestik per kapita (Kal/kapita/hari)
Beras	53985	1407,43
Jagung	12014	481,76
Kedelai	797	88,26
Kc. Tanah	835	51,62
Ubi Kayu	19459	324,34
Ubi Jalar	1840	29,52
Sayuran	9200	41,95
Buah-buahan	15104	91,81
Minyak goreng	3545	272,00
Gula	2196	118,23
Daging sapi & kerbau	505	7,58
Daging ayam	1244	24,45
Telur	1149	21,33
Susu	342	16,50
Ikan	6809	54,12

Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, 2006



Gambar 6.2. Ketersediaan pangan menurut Komoditasnya (Kal/kapita/hari), 2004

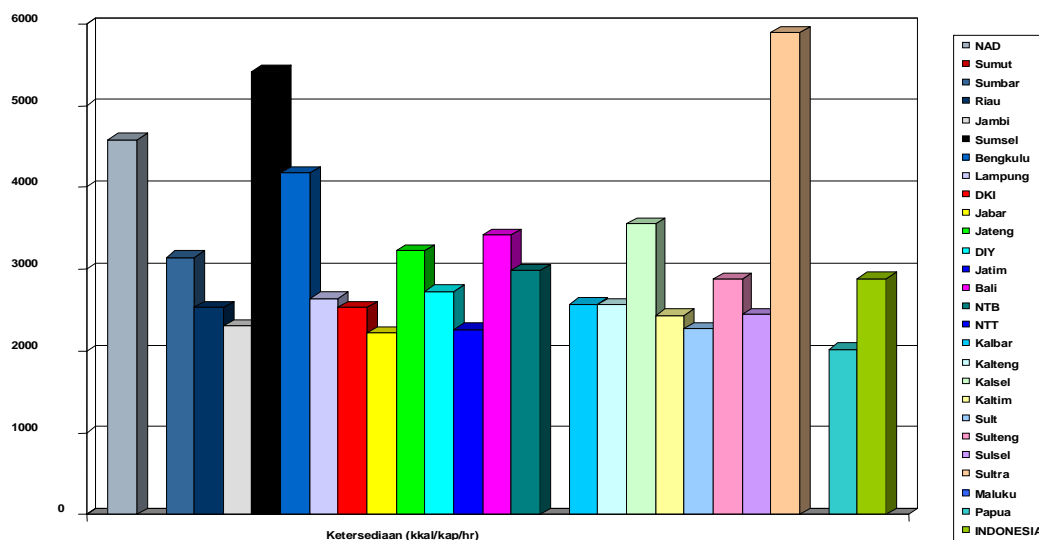
Permasalahan yang terjadi pada aspek ketersediaan ini adalah pola peningkatan produksi pangan cenderung melandai dengan rata-rata pertumbuhan kurang satu persen sedangkan pertambahan penduduk sebesar 1,2% setiap tahun (BPS, 2005). Pertambahan penduduk yang cukup besar akan berdampak pada peningkatan kebutuhan konsumsi dan juga peningkatan kebutuhan fasilitas sosial ekonomi yang mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan. Stagnasi produksi disebabkan oleh lambatnya penemuan dan pasyarakatatan inovasi, serta rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi secara optimal. Melemahnya sistem penyuluhan juga merupakan kendala lambatnya adopsi teknologi oleh petani. Petani di Indonesia yang umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar) yang berjumlah 13,7 juta KK menyebabkan aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi dan sarana produksi sehingga sulit meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya tanpa difasilitasi oleh pemerintah. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta peningkatan kualitas penyuluhan merupakan tantangan ke depan.

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan nasional antara lain disebabkan : (a) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke non pertanian, (b) menurunnya kualitas dan

kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan, (c) rusaknya prasarana pengairan sekitar 30 persen, (d) persaingan pemanfaatan sumberdaya air dengan sektor industri dan pemukiman, (e) kurang terealisasinya harga pupuk bersubsidi, (f) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi, (f) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif, (g) masih tingginya luas areal tanam tebu rakyat dengan pertunasan lama (ratoon), (h) anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.

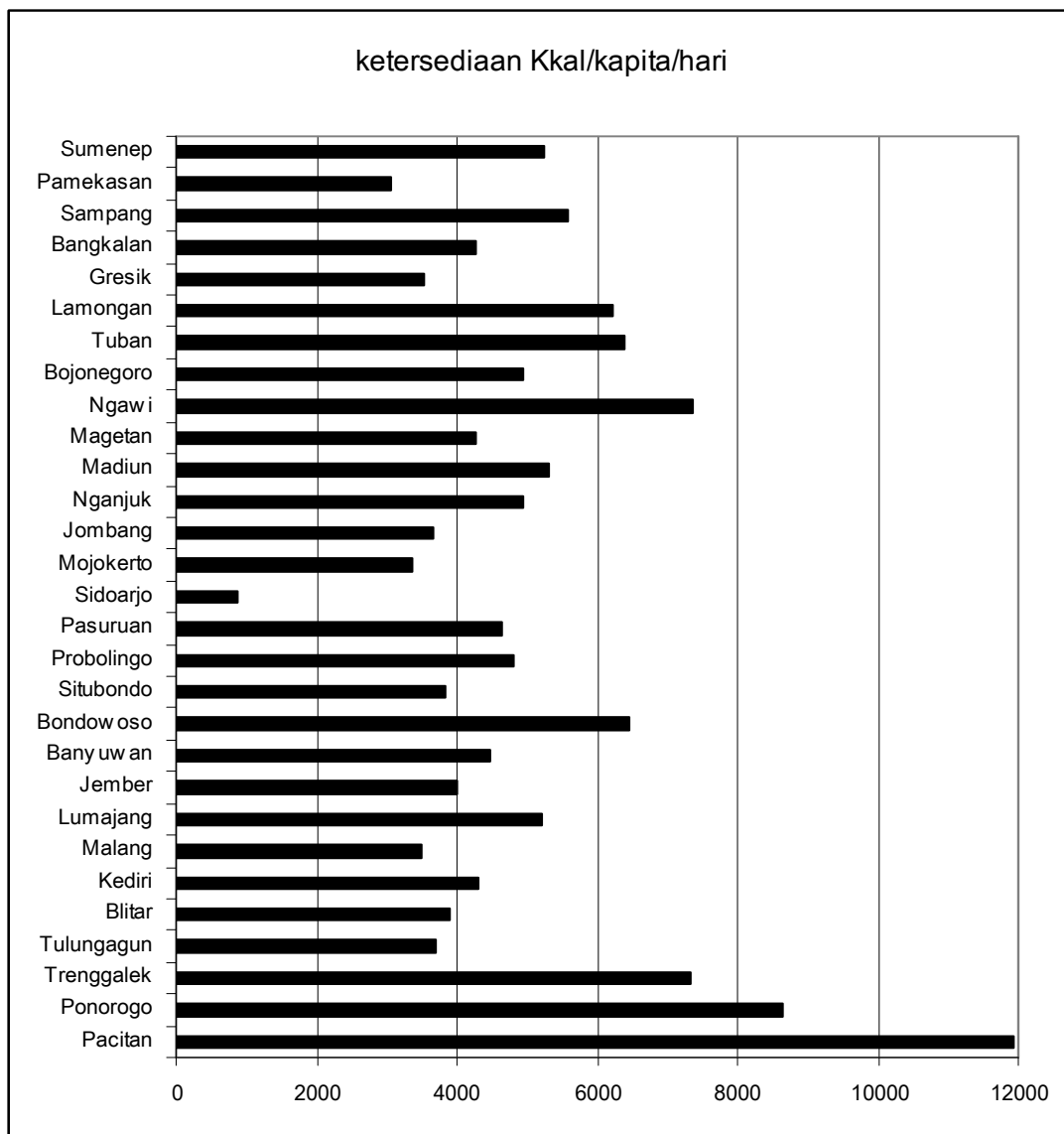
Masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi dan penanganan hasil panen dan pengolahan, menjadi kendala yang menyebabkan menurunnya kemampuan penyediaan pangan dengan proporsi yang cukup tinggi. Pasa padi dan produk hortikultura kehilangan hasil ini mencapai lebih dari 10 persen.

Ditinjau dari ketersediaan pangan per kapita per hari dengan ukuran 2200 kkal/kapita/ per hari dengan data tahun 2002 secara agregat hampir diseluruh kabupaten sudah melebihi standard yang dianjurkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketersediaan pangan di Jawa Timur tidak menghadapi permasalahan serius.



Gambar 6.3. Ketersediaan pangan menurut Propinsi (Kal/kapita/hari), 2003

Tampaknya masalah ketersediaan pangan di wilayah Indonesia dengan mengambil kasus di Jawa Timur, hampir tidak dijumpai permasalahan yang serius mengenai ketersediaan pangan. Hampir di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur ketersediaan pangannya telah tercukupi.



Gambar 6.4. Ketersediaan pangan di Jawa Timur (Kal/kapita/hari), 2003

Ditinjau dari peran propinsi dalam menyediakan pangan di Indonesia sebagaimana diuraikan sebagai berikut

Tabel 6.5. Ketersediaan pangan Berdasarkan komoditas dan Propinsi

	Komoditas	Wilayah Sentra Produksi
1	Padi	Jabar+Banten (20,7%), Jatim (17,8%), Jateng (16,3%), Sulsel (7,1%), Sumut (6,7), dan Sumbar, Sulsel, Lampung (masing-masing > 3%)
2	Jagung	Jatim (36,0%), Jateng (17,7%), Lampung (11,6%), Sumut (6,9%), Sulsel (6,5%), dan Jabar, NTT (masing-masing >4%)
3	Kedelai	Jatim 37,9%), Jateng (20,1%), NAD 7,0%), Jabar (5,4%), Sulsel (4,2%), dan Lampung (2,2%)
4	Kacang Tanah	Jatim (24,4%), Jateng (21,7%), Jabar (14,8%), Sulsel (6,5%), dan Sumut, NTB (masing-masing >3%)
5	Sayuran	Jabar (36,6%), Sumut (19,6%), Jateng (15,1%), Jatim (9,6%), dan Sumbar, Bengkulu, Bali, Sulsel (masing-masing >3%)
6	Buah-buahan	Jabar (26,9%), Jatim (21,1%), Jateng (12,6%), Sumut (5,9%), Sulsel (5,5%), dan Sumsel+Babel, Lampung, NTT (masing-masing >3%)
7	Minyak Sawit	Sumut (39,9%), Riau (21%), Kalbar (6,1%), NAD (6,1%) dan Sumbar (5,4%)
8	Gula Tebu	Jatim (44,1%), Lampung (33,3%), Jateng (7,5%), Jabar (4,2%), dan Sumut (3,9%)
9	Daging	Jabar (21,1%), Jatim (15,6%), Jateng (12,0%), Bali (8,1%), Jakarta (7,7%), Sumut (6,3%)
10	Telur	Jabar (20,8%), Jatim (15,3%), Jateng (14,2%), Sumut (15,0%), Sumbar, Sumsel-Babel, Lampung Sulsel (masing-masing >4%)
11	Hasil Perikanan	Sumatera (27%), Jawa (25%), Sulawesi (18%)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Jawa tampaknya mendominasi untuk ketersediaan pangan khususnya dari tanaman pangan dan peternakan, sedangkan di luar Jawa umumnya pensuplai minyak dan hasil-hasil perikanan.



## Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan di Indonesia telah menjadi sorotan sejak Kongres XI Perhepi dan Kongres ASAE (*Asian Society of Agricultural Economist*) di Bali pada tahun 1986 (Handewi et al, 2003). Kebijakan kemandirian pangan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bila dibandingkan dengan pengadaan pangan melalui impor. Dalam perkembangannya, kebijakan kemandirian pangan telah mewarnai kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang pertanian dan pangan sejak tahun 1970-an. Hal ini dapat dilihat dari kondisi penyediaan pangan yang sebagian besar berasal dari produksi komoditas pangan domestik.

Saat ini terjadi silang pendapat mengenai konsep dan pengertian tentang swasembada pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, bahkan dengan pengertian ketahanan pangan itu sendiri. Berdasarkan pustaka yang ada perbedaan istilah dan konsep tersebut disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

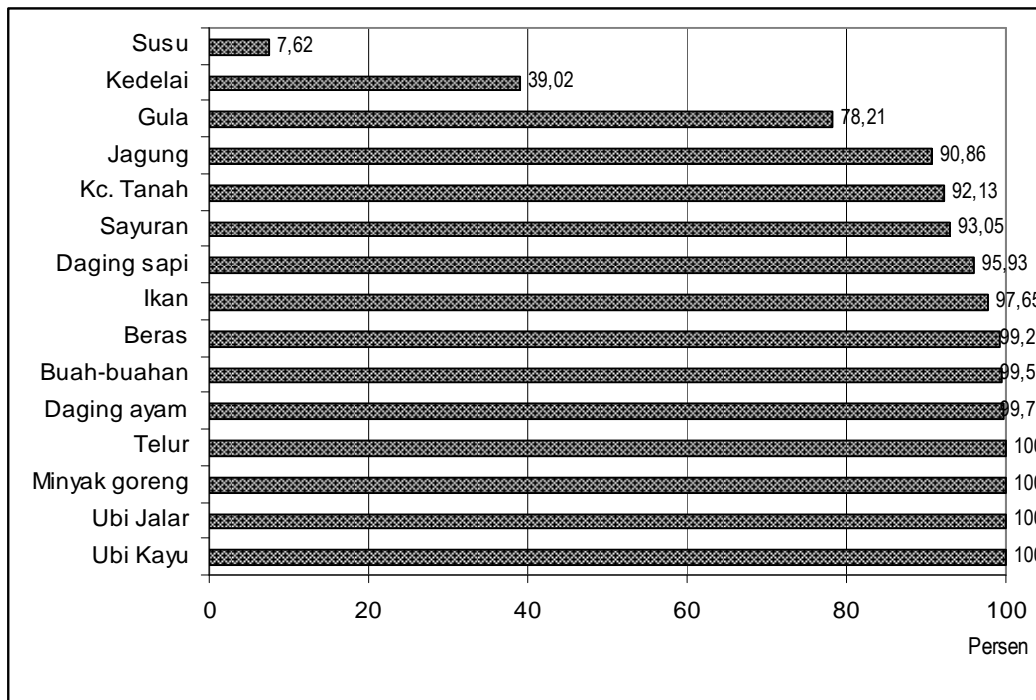
Tabel 6.6. Perbedaan Swasembada, Kemandirian, Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

Indikator	Swasembada Pangan	Kemandirian Pangan	Kedaulatan Pangan	Ketahanan Pangan
Lingkup	Nasional	Nasional	Nasional	Rumah tangga dan individu
Sasaran	Komoditas pangan	Komoditas pangan	Petani pangan	Manusia
Strategi	Substitusi impor	Peningkatan daya saing (promosi ekspor)	Pelarangan impor	Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan
output	Peningkatan produksi pangan (dengan perlindungan pada petani)	Peningkatan produksi pangan yang berdaya saing	Peningkatan produksi pangan(dengan perlindungan pada petani)	Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk)
Outcome	Ketersediaan pangan oleh produk domestik (tidak impor)	Ketersediaan pangan oleh produk domestik (impor hanya pelengkap)	Kesejahteraan petani	Manusia sehat dan produktif (angka harapan hidup tinggi)

Keterangan : Disarikan dari berbagai sumber

Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang bergizi untuk sehat dan produktif. Kemandirian pangan produk pangan Indonesia sebagaimana disajikan dalam Gambar

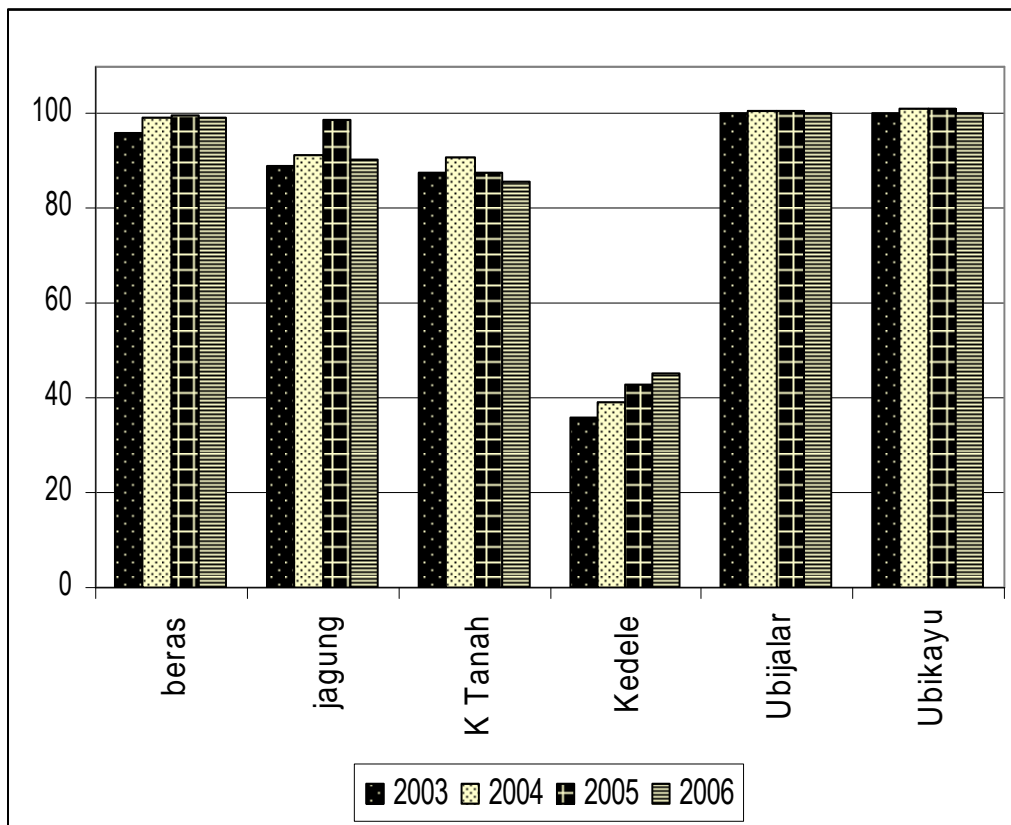
6.5. Jika diasumsikan kemandirian pangan toleransi impornya adalah 10 %, maka kemandirian pangan di Indonesia tidak mengkhawatirkan karena hanya beberapa komoditas pangan yang impornya lebih dari 10 persen. Komoditas susu, kedelai dan Gula yang masih belum mandiri.



Sumber : Dewan Ketahanan Pangan, 2006 (Diolah)

Gambar 6.5. Kemandirian Komoditas Pangan Indonesia 2004

Perkembangan kemandirian pangan dari komoditas pangan Indonesia disajikan dalam Gambar 6.6. Secara umum perkembangan kemandirian pangan Indonesia relatif konstan, hal ini disebabkan komoditas pangan di Indonesia daya saingnya rendah. Dalam teori ekonomi kemandirian pangan hanya dapat dilakukan jika ada peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, tanpa kedua efisiensi tersebut maka pencapaian kemandirian pangan adalah semu.



Gambar 6.6. Perkembangan Kemandirian komoditas pangan Indonesia